**POLITIKA**: **Jurnal Ilmu Politik**

Vol.x, No. x, 202x

doi: 10.14710/politika.1x.x.202x.x-xxx

**DIMENSI SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Kushandajani, Fitriyah, Laila Kholid Firdaus, Rina Martini**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Recieved: (tidak usah di isi)* | *Revised: (tidak usah di isi)* | *Published: (tidak usah di isi)* |

**Abstrak:**

Suara pemilih perempuan perdesaan signifikan dalam jumlah, namun dipertanyakan dalam kualitas. Riset ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan seberapa mandiri perempuan perdesaan dalam menentukan pilihan politiknya, melalui dimensi sosiologi dan psikologi. Teori perilaku memilih dari dua dimensi tersebut diterapkan untuk menjelaskan perilaku pemilih perempuan dalam konteks pemilihan kepada desa. Riset menggunakan dimensi sosiologi yang berisi variabel berupa kondisi sosial ekonomi, agama, dan afiliasi sosial politik serta dimensi psikologis berupa variabel sikap, persepsi, emosi , dan perilaku yang ditujukan kepada kandidat, serta pengaruh keluarga/lingkungan Penggunaan metode kuantitatif dirasa tepat karena bertujuan mengukut tingkat persepsi pemilih perempuan dalam menentukan pilihan di ranah pemilihan kepala desa. Hasil riset menunjukkan perilaku politik perempuan dalam pilkades tidak diputuskannya secara mandiri, melainkan menggunakan referensi panutannya yakni figur laki-laki yang menjadi rujukan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosio-kultural. Ketergantungan berimplikasi pada batasan psikologis pemilih perempuan kepada calon kepala desa perempuan.

Keywords:

Perilaku memilih; pemilih perempuan perdesaan; pemilihan kepala desa;

dimensi sosiologi; dimensi psikologi.

**Pendahuluan**

Indonesia memiliki dua struktur pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Namun berbeda dengan kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kewenangan daerah kabupaten/kota, maka desa memiliki otonomi. Desa disebut memiliki otonomi karena memiliki kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang tercermin dari beberapa ciri berikut: memilih pemimpin (kepala desa) secara langsung , membuat kebijakan atas nama desa yang disebut dengan peraturan desa, serta memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai representasi dari kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa (Kushandajani, 2015)

Dalam hal memilih pemimpinnya secara langsung oleh penduduk desa maka dikenal istilah pemilihan kepala desa (Pilkades). Aktivitas Pilkades merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa (Yuningsih & Subekti, 2016). Disebut demikian karena menyangkut peran serta masyarakat dalam proses pemilihan, diantaranya adalah pemberian suara saat pemilihan berlangsung. Dibandingkan suara laki-laki, maka suara yang sering dipertimbangkan adalah suara perempuan. Hal ini karena sebagai pemilih, perempuan diyakini lebih tinggi kemungkinan menggunakan hak pilihnya oleh karena mereka lebih punya waktu luang, selain itu juga lebih setia, yakni lebih menjaga komitmen untuk tidak merubah pilihannya karena iming-iming barang atau uang.

Sebenarnya suara perempuan dalam politik tidak hanya berbicara jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dalam struktur politik (Bauer, 2015a, 2015b) namun juga posisi perempuan sebagai pemilih, karena jumlah pemilih perempuan yang secara statistik sama besar dengan laki-laki sehingga suaranya ikut juga menentukan seberapa kuat legitimasi calon yang terpilih. Berbagai alasan pemilih perempuan dalam menentukan pilihannya diberikan pada calon tertentu menggambarkan seberapa besar kemandirian perempuan dalam melakukan pilihan politiknya (Kushandajani & Alfirdaus, 2019), aktivitas melakukan pilihan politiknya Ini disebut perilaku memilih.

Konsep perilaku memilih (*voting behavior*) menunjuk pada keikutsertaan warga masyarakat pada setiap Pemilu yang merupakan setiap tindakan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih (Surbakti, 1992) sedangkan Muhtadi (2011) juga Mujani, Liddle dan Ambardi (2012) menekankan perilaku memilih sebagai tindakan warga negara biasa, bukan elit, dalam ikut serta dalam memilih partai politik (parpol), calon, atau isu publik tertentu. Dengan demikian perilaku pemilih menunjuk pada warga negara yang berpartisipasi dalam Pemilu, dan mengapa seseorang memutuskan ikut serta atau absen dalam Pemilu, sekaligus merujuk pada tindakan seseorang memutuskan memilih parpol/calon/isu tertentu dan bukan yang lainnya. Dengan kata lain *voting* mengacu pada pilihan, disebut secara khusus sebagai *voting choice* yang melibatkan berbagai motif memilih. (Evans, 2004). *Voting behavior* juga bisa memprediksi perilaku memilih dari pemilih yang belum mengambil keputusan. Temuan studi yang ditinjau menunjukkan bahwa langkah-langkah implisit dapat berfungsi sebagai pelengkap yang berguna untuk meningkatkan prediksi hasil pemilu. (Gawronski, 2015)

Secara umum dimensi yang menentukan seseorang menggunakan hak pilihnya adalah dimensi sosiologi, psikologi dan pilihan rasional. Namun demikian dalam konteks pemilih perempuan perdesaan dimensi ketiga ditinggalkan dengan asumsi bahwa dimensi sosiologi dan psikologi akan lebih mencerminkan alasan perempuan melakukan pilihan politiknya. Oleh sebab itu tujuan riset ini adalah menjelaskan perilaku memilih perempuan perdesaan dari dimensi sosiologi dan psikologi, dan memetakan kendala bagi perempuan dalam menyampaikan pendapat dan mengekpresikan pilihan mereka di ranah Pilkades.

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan paling awal dalam tradisi perilaku memilih, dan sering disebut sebagai Madzhab Columbia. Studi survey perilaku pemilih ini dipelopori oleh Paul Lazarsfeld dari Colombia University . Ia bersama kawan-kawannya melakukan survey terhadap 600 calon pemilih di Erie County, Ohio (1940). Hasilnya dipublikasikan dengan judul *The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet 1944 dalam Taddicken, 2015). Studi lanjutan dilakukan di Elmira, New York (1948) dipublikasikan dengan judul *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign* (Berelson, Lazarsfeld, and McPhee 1954). Model ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologi pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan. Dalam perpektif yang hampir sama, Romli, dkk (2005) menempatkan perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan-pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok, okupasi, lembaga) maupun secara informal (keluarga, pertemanan, kelompok kecil). Ikatan-ikatan sosiologis semacam agama, kelas sosial, karakteristik demografis dan geografis, umur serta jenis kelamin, secara teoritis dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang.

Adapun secara psikologis, perilaku memilih lebih dititik beratkan pada refleksi kepribadiannya. Sikap memilih tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ikatan emosional pada suatu parpol, orientasi terhadap calon tertentu, dan orientasi terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan psikologis sering disebut Madzhab Michigan. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada aspek psikologis pemilih. Menurut pendekatan ini, kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap parpol/ calon tertentu bukan hanya karena parpol/ calon yang bersangkutan mempunyai kesamaan latar belakang/ karakteristik sosiologis dengan pemilih, tetapi juga secara psikologis dekat dengan pemilih. Salah satu variabel utama dari pendekatan ini adalah identifikasi seseorang atau individu terhadap parpol. (Eriyanto, 2007) Beberapa ahli sepeti Jocely AJ Evans (2004) mengutip Harrop dan W. Miller dalam *Elections and Voters: A Comparative Introduction* (1987) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dari sudut pandang psikologis, yaitu: identifikasi partai (pemilih) bersumber dari keanggotaan kelompok dan pengaruh keluarga. Kemudian indentifikasi partai akan mengarahkan kepada tiga jenis sikap, yaitu sikap terhadap kebijakan parpol, sikap terhadap kelompok dan sikap terhadap calon. Hasil identifikasi tersebutlah yang akan menentukan pilihan politik seseorang dalam Pemilu. (Wahjudi, 2008). Pandangan berbeda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih perempuan disampaikan oleh Yanti (2023) dimana terdapat delapan variabel independen (pendidikan, pendapatan, kesejahteraan, kebahagiaan, sikap mengambil risiko, tempat tinggal, usia, dan status perkawinan) dalam menganalisis determinan preferensi jual beli suara di kalangan pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah. (Yanti, 2023)

Pendekatan campuran, baik sosiologi maupun psikologi dapat ditemukan dari berbagai riset, seperti Blackman and Jackson (2019) yang menemukan bukti adanya bias terhadap kandidat perempuan di kalangan pemilih di Tunisia, khususnya di kalangan pemilih yang menganut norma gender patriarki, dimana semua responden cenderung lebih memilih kandidat yang menekankan isu keamanan dibandingkan hak-hak perempuan. Windari dan Suryadi (2022) menguraikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku memilih, yaitu interpretasi agama, etnis, gender, peran media, persepsi pemilih terkait usia dan program kandidat, afiliasi partai politik, peran keluarga, dan teman sebaya. Adapun untuk memahami pengaruh karakteristik kandidat terhadap pilihan politik, dimana preferensi pemilih bukanlah faktor utama yang menjelaskan rendahnya jumlah perempuan dalam jabatan terpilih ditemukan dalam riset [Schwarz](https://www.semanticscholar.org/author/S.-Schwarz/47568866) dan  [Coppock](https://www.semanticscholar.org/author/A.-Coppock/24563452) (2021). Di Jepang misalnya, kurangnya keterwakilan perempuan sebagian disebabkan oleh stereotip gender dan prasangka terhadap kepemimpinan perempuan di kalangan pemilih. Temuan Ono dan Yamada (2018) menunjukkan bahwa kandidat perempuan menghadapi dilema yang sulit karena mereka harus mempertimbangkan dampak kehilangan dukungan karena gagal memenuhi ekspektasi berbasis gender, dibandingkan dengan hilangnya dukungan secara umum yang akan mereka tanggung jika memenuhi ekspektasi tersebut. Kajian yang mirip dilakukan oleh Dahl dan Nyrup (2020) yang mengukur pengaruh keberpihakan dan stereotip feminin terhadap cara pemilih memandang kandidat perempuan di Danish-USA. Hasil menunjukkan bahwa stereotip feminin dan keberpihakan secara bersama-sama mempengaruhi persepsi terhadap kandidat perempuan.

Penelitian ini dilakukan pada pemilih perempuan di dua desa di Kabupaten Demak. Kedua desa dipilih dengan pertimbangan bisa merepresentasikan perilaku memilih di kalangan perempuan perdesaan sekaligus merepresentasikan kekalahan calon kepala desa perempuan. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel yang ditetapkan ialah (1) pemilih perempuan yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah (2) bertempat tinggal di Kabupaten Demak (3) telah ikut serta dalam Pilkades serentak 2022. Jumlah sampel yang diambil merujuk pada pendapat Cooper dan Emory (1999) dimana penentukan ukuran sampel untuk populasi yang tidak terindentifikasi secara pasti jumlahnya, dapat ditentukan dengan 100 sampel. Jumlah 100 sampel ini dirasa dapat memenuhi syarat untuk mewakili jawaban dari seluruh populasi. Pengujian validitas dilakukan dengan syarat item pertanyaan disebut valid jika hasil yang didapatkan R hitung > R table. Adapun uji reliabilitas melalui syarat instrumen dimana hasil *Cronbach Alpha* yang didapatkan lebih dari 0,5. Adapun proses analisis dilakukan melalui analisis deskriptif untuk menjelaskan kecenderungan jawaban yang telah dipilih oleh responden.

**Perilaku Pemilih Perempuan dalam Dua Dimensi: Sosiologi dan Psikologi**

Pada tahun 2022, tepatnya bulan Oktober diadakan Pilkades serentak di Kabupaten Demak yang didasarkan pada Keputusan Bupati Demak No. 141.1/93 tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak tahun 2022. Ada sebanyak 14 Kecamatan dengan 182 Desa di Kabupaten Demak yang menyelenggarakan Pilkades serentak pada tanggal 16 OKtober 2022. Hasilnya, dari 119 kepala desa petahana yang maju, hanya 43 (36%) yang terpilih kembali, sedangkan 76 (64%) kades petahana tumbang. Pilkades serentak di Kabupaten Demak digelar di 182 desa. Itu artinya, sebanyak 139 desa bakal dipimpin kepala desa baru” (*Radarsemarang.id*,Demak, 18 Oktober 2022). Selain fenomena rendahnya keterpilihan petahana dalam Pilkades, juga munculnya calon kepala desa perempuan di 39 desa. Namun demikian calon kepala desa perempuan yang tepilih masih sangat terbatas, yaitu 9 calon (23,07 %). Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pemilih, dimana pemilih perempuan berimbang antara laki-laki dan perempuan (laki-laki 426.393 orang, perempuan 426.493 orang).

**Dimensi Sosiologi Pemilih Perempuan**

Riset ini mengenai perilaku memilih perempuan perdesaan dalam Pilkades, karenanya sebagai responden adalah perempuan. Berdasar status perkawinan semua responden sudah atau pernah menikah, dan semuanya muslimah. Latar agama yang 100% responden Islam sesuai dengan agama mayoritas penduduk Kabupaten Demak yang mencapai 99,73% adalah beragama Islam. Demak disebut juga sebagai Kota Wali.

Sebanyak 87% responden berusia produktif dengan rentang 23 – 58 tahun. Mayoritas responden (95%) adalah warga desa biasa sedangkan 5% lainnya adalah kategori elit desa bersatus sebagai ketua Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), ketua Rukun Tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW), dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebagian besar responden (44%) adalah ibu rumah tangga, dan 36% diantaranya tidak bekerja. Sebagian yang lain bekerja dengan berdagang (20%) dan sebagai petani (17%). Lainnya adalah pemilik usaha maupun pemilik lahan.

Berdasar pendidikannya mayoritas reponden adalah rendah, yang tidak lulus atau lulus SD mencapai 52% atau mayoritas, lulus SMP 25%, lulus SMA 28%, dan diploma hanya 5%. Mereka juga bukan tenaga terampil, yang memiliki ketrampilan (menjahit, kerajinan, membuat kue) hanya sebesar 18%, selebihnya tidak memiliki ketrampilan khusus. Guna mengukur tingkat ekonomi responden, penelitian ini melihatnya dari sisi pengeluaran rumah tangga per bulan. Berdasar pengeluaran rumah tangga per bulan mayoritas responden tergolong rendah karena pengeluaran rumah tangga mereka di bawah gaji Upah Minimum Regional (UMR) yang tahun 2023 untuk Kabupaten Demak ditetapkan sebesar Rp 2.680.421 per bulan. Rinciannya, sebanyak 57% memiliki pengeluaran rumah tangga per bulan di bawah 2,5 juta rupiah, sedangkan responden dengan pengeluaran 2,5-5 juta rupiah mencapai 40%, pengeluaran 5-75 juta rupiah hanya mencapai 3%. Secara umum pendapatan keluarga responden lebih kecil dibanding pengeluarannya, hanya 10% yang memiliki pendapatan lebih besar. Responden juga punya ketergantungan ekonomi dari suami, kategori reponden yang mengandalkan sumber pendapatan terbesar dari suami mencapai 77% dan sisanya masih bergantung pada orang tua.

Dari aspek aktivitas sosial menunjukkan kategori tinggi dalam bidang keagamaan dan kelembagaan desa, sedangkan terdapat 23% responden yang tidak aktif. Sebanyak 63% responden adalah anggota aktif kelompok keagamaan Islam tingkat desa, 13% terlibat di kelembagaan desa (PKK dan Posyandu), dan terdapat 1% responden punya keterlibatan dalam organisasi profesi. Namun dari semua responden tidak ada yang terlibat dalam keanggotaan parpol maupun sebagai anggota organisasi massa.

Dengan demikian, berdasar penjelasan karakteristik sosial responden ditunjukkan mayoritas responden adalah perempuan warga desa biasa, usia dewasa, sudah/pernah menikah, berpendidikan rendah, dan memiliki ketrampilan terbatas. Mayoritas juga berpendapatan rendah dan bukan pencari nafkah keluarga. Artinya, partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi rendah. Secara ekonomi mayoritas responden punya ketergantungan pada orang lain, mereka bergantung pada suami dan/atau orang tua. Aktivitas responden di ruang publik lebih didominasi kegiatan keagamaan, dan secara formal tidak punya afiliasi dengan partai politik maupun organisasi massa tertentu.

Pilkades di dua desa yang diteliti diikuti oleh calon kepala desa perempuan. Karakteristik sosial para calon kepala desa di dua desa tersebut adalah relatif sama. Semua calon kepala desa memeluk agama Islam dan mereka adalah penduduk asli desa yang bersangkutan. Perbedaan para calon kepala desa hanya pada jenis kelamin, karena terdapat calon kepala desa berkelamin perempuan dan yang laki-laki. Hasil pilkades menunjukkan calon kepala desa laki-laki lebih didukung oleh mayoritas pemilih, termasuk oleh pemilih perempuan, sehingga calon kepala desa laki-laki yang memenangkan Pilkades.

Studi perilaku memilih berdasar Madzhab Columbia menjelaskan bahwa kesamaan karakteristik sosial yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam keputusan memilih kepada calon tertentu adalah ciri pemilih sosiologis. Kesamaan agama dalam memilih adalah salah satu ciri jenis pemilih sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas responden (78%) memang menimbang kesamaan agama dirinya dengan agama calon dalam memilih calon kepala desa. Oleh sebab itu perilaku keagamaan seorang calon kepala desa juga diperhatikan. Penilaian bahwa calon kepala desa perempuan telah berperilaku sesuai norma agama dinyatakan oleh hampir semua responden, yakni oleh sebesar 95% responden. Namun menurut mayoritas responden (59%) calon kepala desa perempuan bukan merupakan tokoh agama atau orang yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya berdasarkan keahlian di bidang agama, dan hanya sebagian kecil responden (34%) yang menilai calon kepala desa perempuan merupakan keturunan atau berasal dari keluarga tokoh agama (34%). Kata lain, dari sisi agama kedudukan calon kepala desa perempuan adalah warga biasa, bukan kategori tokoh agama. Padahal, ketika semua calon kepala desa punya kesamaan agama, maka pertimbangan ketokohan sesorang ikut diperhatikan dalam memilih calon kepala desa, hal ini bisa dengan mudah dilakukan pemilih oleh karena mayoritas responden mengenali (64%) dengan baik keseharian para calon kepala desa. Lingkup wilayah desa yang sempit memudahkan interaksi sosial diantara penduduknya, sehingga secara umum pemilih punya akses mengenal perilaku kandidat sehari-hari.

**Dimensi Psikologi Pemilih Perempuan**

Pilkades adalah mekanisme memilih pemimpin tingkat desa yang melibatkan pemilih secara langsung. Oleh sebab itu kesukaan pemilih kepada calon kepala desa adalah penting, karena calon kepala desa yang memeroleh suara terbanyak diantara semua calon kepala desa yang ada yang dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih. Berbagai strategi dilakukan oleh calon kepala desa dengan dibantu tim suksesnya untuk memerebutkan suara pemilih. Sementara itu pemilih perempuan menjadi target kampanye semua calon kepala desa oleh karena jumlah mereka berbanding sama dengan pemilih laki-laki, yakni 1:1. Selain itu ada karakteristik pemilih perempuan sebagai pemilih loyal menjadikan para calon kepala desa memandang perempuan sebagai pemilih potensial dan karenanya mereka berupaya meraih dukungan suara perempuan. Riset ini menjelaskan perilaku pemilih perempuan dalam pilkades yang calon kepala desa perempuan dinyatakan kalah, persentase perolehan suaranya jauh di bawah angka 50% padahal jumlah pemilih perempuan di kedua desa yang diteliti di atas angka persentase tersebut.

Secara umum responden punya ketergantungan kepada suaminya dalam mengambil keputusan untuk memilih . Sebagian lagi mereka merujuk kepada petunjuk orang tua dan tokoh desa. Pendapat suami selalu didengar oleh mayoritas responden (85%) dan apa yang menjadi pilihan suami menjadi rujukan mereka dalam memilih (52%). Pihak lain yang juga didengar adalah pendapat orang tua (76%), dan sebagian responden (35%) menjadikan orang tua sebagai rujukan dalam memilih. Hal yang sama pada responden juga mendengarkan petuah dan pendapat tokoh desa ( 73%), dan 26% responden menjadikan mereka sebagai rujukan memilih

Berdasar Madzhab Michigan melihat faktor psikologis yang lebih berperan dalam mempengaruhi perilaku memilih. Pengetahuan responden kepada figur calon kepala desa perempuan sangatlah baik, secara umum hampir mutlak (95%) responden memiliki persepsi yang positif terhadap tutur kata calon kepala desa perempuan. Secara umum, sejumlah sifat pribadi yang melekat pada calon kepala desa perempuan juga dipahami dengan baik oleh responden. Mayoritas responden ( 88%) mengganggap calon kepala desa perempuan memiliki keteguhan hati, dan 85% responden menganggap calon kepala desa perempuan adalah pribadi yang jujur. Berdasarkan sifat-sifat baik yang diketahui dimiliki oleh calon kepala desa perempuan telah memunculkan sikap semua responden yang mengaku bahwa mereka menghormati pribadi calon kepala desa perempuan, mereka menilai baik perilaku calon kepala desa perempuan (93%), mempercayai ucapan calon kepala desa perempuan (82%). Penghormatan dan pengakuan budi baik calon kepala desa perempuan ditunjukkan dalam perilaku keseharian responden kepada calon kepala desa perempuan yang bersangkutan. Sikap responden kepada calon kepala desa perempuan adalah dengan bertindak sopan (98%), bersikap ramah (97%), dan menyapa jika bersua (96%). Namun mayoritas responden (60%) menyatakan tidak pernah mengobrol langsung dengan calon kepala desa perempuan tersebut. Keterangan responden ini menjelaskan bahwa responden punya tingkat pengetahuan (kognisi) yang baik terhadap calon kepala desa perempuan dan dicitrakan sebagai pribadi yang baik, namun secara afeksi tidak terbangun hubungan psikologis antara pemilih perempuan dengan calon kepala desa perempuan tersebut. Aspek afeksi Ini penting dalam menjelaskan perilaku memilih seseorang menurut Madzhab Michigan.

Relasi yang secara umum terlihat renggang antara responden dengan calon kepala desa perempuan bisa dijelaskan oleh karena terbatasnya aktivitas sosial mayoritas responden. Secara umum mayoritas responden hanya aktif pada kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah di masjid setempat dan mengikuti pengajian yang rutin diselenggarakan di lingkungannya. Sementara itu, berdasarkan aktivitas sosial lainnya memang menunjukkan antara mayoritas mutlak responden dengan calon kepala desa perempuan tidak terhubung intens. Responden dan calon kepala desa perempuan tidak berasal dari sesama anggota kelompok sosial (94%), tidak pula punya latar belakang sebagai sesama anggota yang aktif di lembaga desa (98%), sesama anggota di parpol (100%), sesama anggota organisasi kemasyarakatan (100%), dan sebagai sesama anggota organisasi profesi (99%).

**Analisis Sosiologi dan Psikologi pada Perilaku Pemilih Perempuan**

Di kedua desa yang diteliti, calon kepala desa perempuan gagal terpilih dengan persentase perolehan suara jauh di bawah persentase pemilih perempuan. Keselarasan antara jenis kelamin dan perilaku memilih dalam temuan penelitian ini tidak segaris lurus. Hasil pilkades di kedua desa penelitian menunjukan responden yang semuanya adalah perempuan tidak otomatis memilih calon kepala desa perempuan pula. Hanya sebanyak 14% responden yang menyatakan saat pilkades telah memilih calon kepala desa perempuan, sisanya (86%) mengatakan memilih calon kepala desa yang laki-laki. Pilihan kepada siapa saat pilkades ternyata cenderung berdasar pendapat tokoh rujukan mereka.

Berdasar pada data tentang status sosial ekonomi responden bisa dijelaskan mayoritas responden adalah warga biasa atau masyarakat kebanyakan, baik karena posisi dirinya, karena posisi orang tua dalam masyarakat maupun posisi suaminya. Kelompok mayoritas ini berlatar belakang pendidikan rendah, dan secara ekonomi rentan. Dalam jumlah kecil terdapat responden kategori elit karena pendidikannya lebih tinggi, secara ekonomi mandiri dan punya status sosial karena dirinya, posisi suami ataupun posisi orang tua di masyarakat. Pola ini menunjukkan keumuman startifikasi sosial dalam masyarakat yang digambarkan semacam piramida, dengan individu yang ada di puncak piramida sedikit tetapi menguasai sumber daya besar, makin ke bawah melebar karena semakin banyak anggotanya tetapi makin mengecil sumber dayanya (Haryanto, 2017).

Dalam semua cabang kehidupan akan memunculkan kelompok elit dan massa. Berdasar penguasaan sumber dayanya perempuan lebih rendah dari laki-laki karena fakt peran gender berkontribusi. (Haryanto, 2017) Artinya perempuan lebih berpotensi berada pada kelompok massa bukan elit. Sehubungan dengan itu, dalam konteks partisipasi politik posisi ini mempengaruhi derajat partisipasi politik perempuan. Pang, Zeng, dan Rozelle (2013) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh (1) tingkat pendidikan, (2) tingkat melek huruf, serta (3) peran tradisional yang terkait dengan gender.

Profil responden kiranya menjelaskan tingginya ketergantungan responden kepada pihak luar dirinya dalam membuat keputusan memilih yang dikategori sebagai bukan pemilih mandiri atau pemilih otonom. Kebutuhan hadirnya panutan dalam membuat keputusan memilih sejalan dengan profil responden, secara umum responden adalah perempuan warga biasa dengan akses pendidikan, ekonomi, dan sosial terbatas. Ketidakmandirian responden dalam membuat keputusan memilih juga dipicu oleh rendahnya dimensi sosiologis dan psikologis dalam perilaku memilih mereka terhadap calon kepala desa perempuan. Secara umum responden tidak terafiliasi dengan calon kepala desa perempuan berdasarkan karakteristik sosialnya, demikian pula halnya dalam hubungan psikologis responden kepada calon kepala daerah perempuan yang juga rendah. Ruang kosong ini yang kemudian diisi oleh tokoh panutan mereka untuk dirujuk pendapatnya tentang kandidat yang layak dipilih.

Orientasi pilihan terhadap calon kepala desa dalam penelitian ini menunjukkan masih adanya pengaruh agama dalam perilaku memilih. Mayoritas responden setuju untuk memilih calon kepala desa yang agamanya sama (78%). Namun, ketika semua calon kepala desa, laki-laki dan perempuan, beragama Islam yang juga menjadi agama semua responden, maka yang dilihat responden bukan sekedar calon yang beragama sama, melainkan ketokohannya berbasis agama yang lazimnya adalah figur laki-laki.

Penelitian ini menunjukkan calon kepala desa perempuan juga gagal dalam mendekati pemilih perempuan dari aspek afeksi/emosi yang memunculkan hubungan psikologis walaupun berhasil dari aspek kognisi. Secara umum responden mempersepsikan calon kepala desa perempuan sebagai pribadi yang baik. Ada sebanyak 64% responden yang mengenali calon kepala desa sebagai sosok perempuan dengan baik. Namun sayangnya responden tidak merasa punya kedekatan khusus secara emosi kepada calon kepala desa yang bersangkutan, sehingga dorongan internal untuk memilihnya dalam Pilkades tidak ada. Lemahnya relasi psikologis ini tercermin dari terbatasnya interaksi yang intens antara kandidat dan pemilih perempuan karena keterbatasan akses pemilih perempuan, oleh karena mayoritas responden punya aktivitas sosial yang tunggal hanya di kegiatan keagamaan, dan mereka tidak banyak terlibat di aktivitas sosial lainnya yang sebenarnya lebih memberi panggung bagi perempuan. Terbatasnya relasi dengan calon kepala desa perempuan tercermin pada pernyataan responden yang mengakui tidak mengenali pemikiran calon kepala desa perempuan untuk perbaikan desanya (61%), mereka juga tidak tahu program-program apa yang ditawarkan calon yang bersangkutan (52%). Realitas ini menunjukkan bagi calon kepala desa perempuan pilkades belum menjadi panggung politik.

Penelitian ini menemukan bahwa responden hanya mampu menilai sosok calon kepala desa perempuan yang mereka anggap positif. Responden belum memiliki kapasitas untuk menilai permasalahan desa dan tawaran program yang diajukan calon. Kemampuan mereka dalam menilai calon kepala desa dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan karakteristik masyarakat pedesaan yang cenderung akrab. Mereka mampu menilai sifat-sifat yang melekat pada diri seorang calon sebagai sifat baik seorang pemimpin, tanpa harus berkomunikasi secara langsung dan intens.

Hasil riset menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Coffe dan Bolzendahl, 2010; Pang dan Rozelle, 2010; Ondercin dan Jones-White, 2011; Peng, Zeng, dan Rozelle, 2013; Bayyurt dan Caha, 2020), partispasi rendah ini dilihat dari aspek kualitas, sementara secara kuantitas partisipasi perempuan tinggi karena kecenderungannya perempuan hadir menggunakan hak memilihnya. Secara kualitas partisipasi perempuan yang lebih rendah, karena partisipasi politik bukanlah suatu konsep yang mengacu pada satu kegiatan saja, melainkan berbagai kegiatan berupa tindakan individu warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan dan memilih pemimpin. Partisipasi politik membentuk piramida berdasarkan intensitasnya. Perilaku pemilih adalah perilaku pada hari pemungutan suara. Dalam piramida partisipasi politik, partisipasi dalam pemungutan suara merupakan bentuk partisipasi politik yang paling rendah, pada tingkat ini perempuan cenderung terlibat. Hal yang menarik dari temuan penelitian ini adalah responden dalam menyalurkan hak pilihnya tidak mempunyai kapasitas sebagai pemilih otonom, mereka memilih tokoh-tokoh yang dipersepsikan baik oleh lingkungan keluarga, terutama suami, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Hasil tersebut menunjukkan posisi yang berbeda dengan temuan Blackman and Jackson (2019) yang studinya di Tunisia menemukan perilaku memilih perempuan sudah berorientasi pada isu, meski berdasarkan teori keselarasan peran ditemukan bias isu terhadap kandidat perempuan terutama di kalangan pemilih yang menganut norma gender patriarki. Temuan studi Ini menunjukkan preferensi memilih perempuan desa lebih ditentukan oleh pihak suami/orang tua dibandingkan pilihan isu yang diusung kandidat kepala desa perempuan. Meskipun kalangan pemilih perempuan juga memiliki basis norma gender patriarki yang sama dengan yang terjadi di Tunisia, namun justru hasil riset ini yang lebih membuktikan bagaimana bekerjanya norma gender patriarki dalam menentukan preferensi pemilih perempuan.

Ketidaksamaan hasil riset ini dengan hasil temuan Windari dan Suryadi (2022) maupun [Schwarz](https://www.semanticscholar.org/author/S.-Schwarz/47568866) dan [Coppock](https://www.semanticscholar.org/author/A.-Coppock/24563452) (2021) lebih disebabkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan responden yang berbeda sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda. Satu-satunya variabel yang sama seperti yang disampaikan Windari dan Suryadi (2023), yang mempengaruhi pilihan adalah variabel peran keluarga. Adapun karakteristik sosial calon (gender, agama, usia, afiliasi sosial) memang tidak menentukan pilihan pemilih perempuan sebagaimana disampaikan [Schwarz](https://www.semanticscholar.org/author/S.-Schwarz/47568866) dan [Coppock](https://www.semanticscholar.org/author/A.-Coppock/24563452) (2021).

Kurangnya keterwakilan perempuan di bidang politik sebagian disebabkan oleh stereotip gender dan prasangka terhadap kepemimpinan perempuan di kalangan pemilih (Ono & Yamada, 2018), justru tidak ditemukan di riset ini. Riset ini menunjukkan bahwa calon kepala desa perempuan tidak dibebani ekspektasi berbasis gender, mengingat orientasi pilihan terhadap calon lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan keluarga (suami dan orang tua). Ini juga merupakan jawaban terhadap kegagalan calon kepala desa perempuan dalam bersaing di ranah Pilkades. Hal yang sebaliknya terjadi dengan tidak terdeteksinya pengaruh keberpihakan dan stereotip feminin terhadap cara pemilih memandang calon perempuan, berbeda dengan pendapat Dahl dan Nyrup (2020) yang menunjukkan bahwa stereotip feminin dan keberpihakan secara bersama-sama mempengaruhi persepsi terhadap calon perempuan.

**Penutup**

Perilaku memilih perempuan dalam pilkades tidak diputuskan secara mandiri melainkan menggunakan referensi panutannya, yakni figur laki-laki yang menjadi rujukan. Ketergantungan pada panutan dalam perilaku memilih ini dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural yang lebih memberi panggung pada figur laki-laki yang berdampak membatasi akses pemilih perempuan kepada calon kepala desa perempuan.

Simpulan umum tersebut diperoleh dari hasil analisis perilaku pemilih perempuan dari dua dimensi: sosiologi dan psikologi. Dari dimensi sosiologi disimpulkan bahwa pemilih perempuan mayoritas memiliki karakteristik sama, baik itu usia, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi keluarga, agama, maupun afiliasi sosial. Semua variabel tersebut tidak mendorong ke arah perilaku memilih “perempuan pilih perempuan”. Meskipun afiliasi dengan kelompok keagamaan (Islam) sangat tinggi dan sama afiliasinya dengan calon kepala desa perempuan, namun karena aktivitas di lembaga desa, partai politik, organisasi massa, dan organisasi profesi nyaris tidak ada, maka hasilnya tidak signifikan menggiring pilihan ke arah calon kepala desa perempuan.

Dimensi psikiologis menghasilkan penjelasan perilaku pemilihan perempuan yang dalam empat kategori: sikap, persepsi, emosi dan perilaku terhadap kandidat. Satu-satunya yang tinggi hanya sikap, sedangkan ketiga variabel lain rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan psikologis antara pemilih perempuan dan calon kepala desa perempuan rendah. Keterikatan psikologis terjadi hanya diantara pemilih perempuan dengan suami, orang tua, dan tokoh masyarakat.

**Pendanaan**

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana DIPA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan kontrak berdasarkan SK Dekan Fisip Universitas Diponegoro Nomor: 0018/UN7.F7/HK/IV/2023.

**Daftar Pustaka**

Behaviour in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, *2*(1), 1-10.

Bauer, NM. (2015a). Who stereotypes female candidates? Identifying individual differences in feminine stereotype reliance, Politics, Groups, and Identities. Jan 2; 3(1), 94-110.

Bauer NM. (2015b). Emotional, sensitive, and unfit for office? Gender stereotype activation and support female candidates. *Political Psychology*, Dec; 36(6), 691-708.

Bayyurt, N. & Çaha, H. (2020). Determination of women’s voting behavior; A machine learning approach in the Turkish political arena. *RIMCIS: Revista Internacionaly Multidisciplinar en Ciencias Sociales*, 9(3), 260-288.

Berelson, B.R., Lazarsfeld, P.F. & Mcphee, W.N. (1954) Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. University of Chicago Press, Chicago.

Blackman, A. & Jackson, M. (2019). Gender Stereotypes, Political Leadership, and Voting Behavior in Tunisia, [*Political Behavior*](https://link.springer.com/journal/11109) **,** Vol. 43,  1037–1066, DOI:[10.1007/s11109-019-09582-5](https://doi.org/10.1007/s11109-019-09582-5)

Coffé, H. & Bolzendahl, C. (2010). Same game, different rules? Gender differences in political participation. *Sex roles*, *62*(5), 318-333

Cooper, D.R. & William, E. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, alih bahasa Widyono Soecipto dan Uka Wikarya, Jilid 11, Jakarta: Erlangga.

[Dahl](https://www.semanticscholar.org/author/Malte-Dahl/32931047),M. & [Nyrup](https://www.semanticscholar.org/author/Jacob-Nyrup/1659389859),J. (2020). Confident and cautious candidates: Explaining under‐representation of women in Danish municipal politics, *European Journal of Political Research*, DOI:[10.1111/1475-6765.12396](https://doi.org/10.1111/1475-6765.12396)

Eriyanto. (2007). “Parpol dan Peta Studi Perilaku Pemilih di Indonesia”, *Kajian Bulanan LSI*, Edisi 06 , 13-23.

Evans, J.A.J. (2004). *Voters and Voting*, London: SAGE Publication.

Friese, M., Smith C.T., & Koever M., Bluemke M. (2016). Implicit measures of attitudes and political voting behavior. *Social and Personality Psychology Compass*. Apr, 10(4), 188-201

Gawronski B., Galdi, S.,& Arcuri, L. (2015), What can political psychology learn from implicit measures? Empirical evidence and new directions. *Political Psychology*, Feb;36(1), 1-7.

Haryanto. (2017). Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: PolGov.

Kushandajani, K. (2015), Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia*, *4*(2), 369–396. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8656/7744>

Kushandajani & Alfirdaus, L K. (2019). Women’s empowerment in village governance transformation in Indonesia: Between hope and criticism. *International Journal of Rural Management*, Apr, 15(1), 137-57.

Muhtadi, B. “Strategi Pemetaan Dan Perilaku Pemilih Dalam Pilkada”, *Slide* (diunduh dari rakornas.demokrat.or.id/wp.../Materi-Burhanuddin-Muhtadi-1.pdf.

Mujani,S. & Liddle, R. W., Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia, Pasca-Orde Baru*, Bandung: Mizan.

Ondercin, H. L., & Jones‐White, D. (2011). Gender Jeopardy: What Is The Impact Of Gender Differences In Political Knowledge On Political Participation?. *Social Science Quarterly*, *92*(3), 675-694.

Ono, Y. & [Yamada](https://www.semanticscholar.org/author/M.-Yamada/48632385), M. (2018). Do Voters Prefer Gender Stereotypic Candidates? Evidence From A Conjoint Survey Experiment. in Japan *Political Science Research and Methods*, DOI:[10.1017/psrm.2018.41](https://doi.org/10.1017/psrm.2018.41).

Pang, X., Zeng, J., & Rozelle, S. , 2013, Does Women's Knowledge of Voting Rights Affect their Voting Behaviour in Village Elections? Evidence from a Randomized Controlled Trial in China. *The China Quarterly*, 213, 39-59

Radar Semarang.

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2022/10/18/hasil-lengkap-pilkades-serentak-di-kabupaten-demak-76-petahana-tumbang-43-terpilih-lagi/>

Ridwan, A. (2000). “Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 di Indonesia”*, Jurnal Demokrasi dan HAM,* Jakarta: The Habibie Center.

Romli, L dkk. (2005). *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: P2P-LIPI.

[Schwarz](https://www.semanticscholar.org/author/S.-Schwarz/47568866),S. &  [Coppock](https://www.semanticscholar.org/author/A.-Coppock/24563452), A. (2021). Meta-Analysis of Sixty-Seven Factorial Survey Experiments, [*The Journal of Politics*](https://www.journals.uchicago.edu/journal/jop),  [84 (2)](https://www.journals.uchicago.edu/toc/jop/2022/84/2)

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.

Taddicken, M. ( 2015). The People a Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign- von Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet (1944), [*Schlüsselwerke der Medienwirkungsforschung*](https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-09923-7), 06 November 2015, 25-35.

Wahjudi, S. (2008), “Menakar Perilaku *Voter* dan Demokratisasi Media Dalam Pemilu”, *Jurnal Semiotika*, Juni 2008, vol.2, 34-44

Windari, T., & Suryadi, B. (2022). Women, Do We Support One Another? Voting Behavior of Indonesian Female College Students for a Female Candidate amidst Covid-19 Pandemic, *Journal of International Women's Studies*, 24 (3)

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”. *Jurnal Politik*, *1*(2). DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>

Yanti, M., Malinda, M., & Tamsyah, I. (2023), “Why does female voters prefer vote buying in local head elections ?”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik***,** 14(1).DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.107-122

**Tentang Penulis**

**Kushandajani** adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema Pemerintahan Desa dan Pemerintahan daerah.

**Fitriyah** adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema pemilihan Umum dan Partai Politk.

**Laila Kholid Alfirdause** adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema kebijakan publik, studi demokrasi dan gerakan sosial.

**Rina Martini** adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema Birokrasi.